

ABSTRAK

Bencana banjir adalah fenomena yang menjadi masalah di Metropolitan Semarang. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, pola penggunaan lahan, dan drainase yang kurang memadai. Kondisi tersebut diperparah dengan tata kelola pada DAS dan pola pengelolaan yang tumpang tindih yang kurang dapat merespon permasalahan yang terjadi. Berdasarkan data pada periode bulan Januari hingga April tahun 2023 tercatat sebanyak 18 kejadian banjir di Metropolitan Semarang. Dengan urgensi tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang fokus pada penyebab banjir di Metropolitan Semarang. Salah satu permasalahan adalah pada daerah hulu sungai DAS Garang. Wilayah DAS yang mencakup 3 unit administrasi yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal perlu mendapat perhatian khususnya daerah hulu yang belum dapat diatasi permasalahan fisik dan lingkungannya. DAS Garang terbagi menjadi empat sub-DAS diantaranya yaitu DAS Garang Hulu, DAS Kreo, dan DAS Kripik, serta DAS Garang Hilir atau Banjir Kanal Barat. Berdasarkan aliran air sungainya berasal dari Sungai Kreo, Sungai Kripik, dan Sungai Garang Hulu yang mempertemukan atau menyatu menjadi Sungai Garang pada bagian hilir DAS, yang kemudian berbentuk seperti botol yang mana pada hulu DAS membesar dan mengecil di bagian hilirnya. Wilayah Metropolitan Semarang sering terjadi banjir karena keberadaannya berada di hilir DAS Garang. Bencana banjir memiliki keterkaitan dalam pengelolaan DAS, apabila tata kelola DAS kurang baik, dan tidak segera diperbaiki maka pergerakan komponen air yang mengalir pada aliran DAS akan menyebabkan bencana banjir.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan di DAS Hulu Sungai Garang dan efektivitasnya dalam mengurangi risiko banjir di Metropolitan Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Hasil temuan studi dari penelitian ini adalah pemodelan pola pengelolaan bencana banjir, terdapat adanya ketidakselarasan antara kebijakan perencanaan tata ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya perubahan penggunaan lahan, lemahnya penegakan peraturan, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Hal tersebut berdampak pada penurunan wilayah resapan air, peningkatan permukaan, dan risiko banjir.

Peningkatan risiko dibuktikan dengan beberapa titik asal bencana dimana terjadi kerusakan lingkungan di sekitar DAS. Hal ini terkonfirmasi bahwa tumpang tindih pengelolaan dan belum jelasnya pembagian wewenang menyebabkan pengelolaan Sungai dan mitigasi banjir belum optimal dilakukan. Dengan temuan tersebut, maka perlu penerapan peraturan khususnya pengendalian penggunaan lahan yang lebih ketat, mendorong reboisasi dan infrastruktur hijau, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko banjir. Spot-spot utama seperti beberapa desa di Ungaran Barat dan pertumbuhan di Ungaran Timur perlu dikendalikan. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kolaborasi antar stakeholder, mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Hal ini penting karena peran dari masing-masing aktor yang terlibat dalam upaya pengendalian kerusakan DAS dan mitigasi banjir belum terintegrasi dan sinkron dengan kebijakan yang berlaku. Dengan demikian maka perlu tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan DAS dan pola pengelolaan yang kolaboratif perlu dilakukan. Selanjutnya, di masa depan, perlu ada fokus kajian yang lebih mendalam tentang dinamika penggunaan lahan dan pengembangan pemodelan prediksi bencana banjir sebagai landasan bagi strategi pengelolaan daerah aliran sungai yang lebih efektif dengan tujuan untuk melindungi wilayah yang terdampak bencana banjir.

Kata Kunci: Stakeholder, Pemerintah, Pengurangan Risiko Banjir, Daerah Hulu DAS Garang